

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Handajaningrat, Soewarno & R. Hindratmo, 1993, *Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintah Daerah, Kota dan Desa*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Hariadi, Pramono, dkk, 2013, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta.
- Lutfi Muh, Hamidi Jazim et all, 2013, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head to a Good Village Governance)*, UB Press, Malang
- Muchsan, 2007, *System Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Simamora, Henry, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN
- Situmorang, Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, (cetakan II).
- Soemitro, Roni. Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Buku Beta Jogjakarta

Sumardjono, Maria. SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Bahan Kuliah*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjandra Riawan M dan Kresno Budi Sudarsono, 2009, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, hlm. 85.

Wasito, Hermawan, 1997, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa, Cet. 4*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wasistiono Sadu, Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.

## **B. Jurnal dan Makalah**

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*, Jakarta.

Eko, Sutoro, 2016, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonom Desa*, Working Paper Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.

Hamidi, Hanibal dkk, 2015, *Indeks Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta.

Pahlevi, Indra 2015, *Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri "Dana Desa dan Permasalahannya"*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Rumesten Iza RS, *Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif*, Jurnal Simbur Cahaya Vol. XVI No. 44 Januari 2011, Unit Penelitian FH Universitas Sriwijaya Palembang.

....., *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, 136Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1 Januari 20121, Unit Penelitian FH Universitas Sriwijaya Palembang.

Sumartono, 2006. *Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.

Syaifuddin, 2006, *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU Di Era Reformasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vol 13 Januari 2006.

### C. Tesis dan Disertasi

Halwan, Muhammad, 2016, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus tentang Kesiapan Perangkat Desa di Kecamatan Galesong Kabupaten Talakar, Sulawesi Selatan)*, Tesis, Magister Hukum FH UGM. Yogyakarta

Darmansyah, 2016, *Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)*, Tesis, Magister Hukum FH UGM, Yogyakarta.

Riez Kifli Kolewora, 2018, *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul terhadap Desa yang Dipandang Tidak Baik dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Tesis, Magister Hukum UGM, Yogyakarta.

Williams R, Muhammad, 2016, *Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Kasus pada 5 Desa di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar)*, Tesis, Magister Akuntansi FE UGM, Yogyakarta.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13)
- Permendes 22 tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2016)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2039)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);